

# LAPORAN




**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**TRIWULAN I  
PERIODE JANUARI - MARET 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
TRIWULAN I PERIODE JANUARI - MARET 2023  
DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Disahkan di Pangkalan Balai  
Pada Hari Rabu, 03 April 2023

 Ketua Tim Survei,



WARNO, S.H.  
NIP. 19670904 199103 1 002

Megetahui,  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, 

  
  
FITRI AGUSTINA, S.H.  
NIP. 19790825 200604 2 002

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB II</b> .....	4
<b>METODOLOGI</b> .....	4
2.1. Metode Penelitian.....	4
2.2. Populasi Dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	5
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	5
<b>BAB III</b> .....	7
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	7
3.1. Profil responden.....	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan .....	21
<b>BAB IV</b> .....	22
<b>PENUTUP</b> .....	22
4.1. Kesimpulan .....	22
4.2. Rekomendasi .....	22
<b>LAMPIRAN</b> .....	24

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### 1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi Sisuper. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dari 01 Januari – 31 Maret 2023 dan diperoleh 39 responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggungjawab survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan

mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



**Tabel 1**  
**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

## BAB II

### INDEKS PERSEPSI KORUPSI

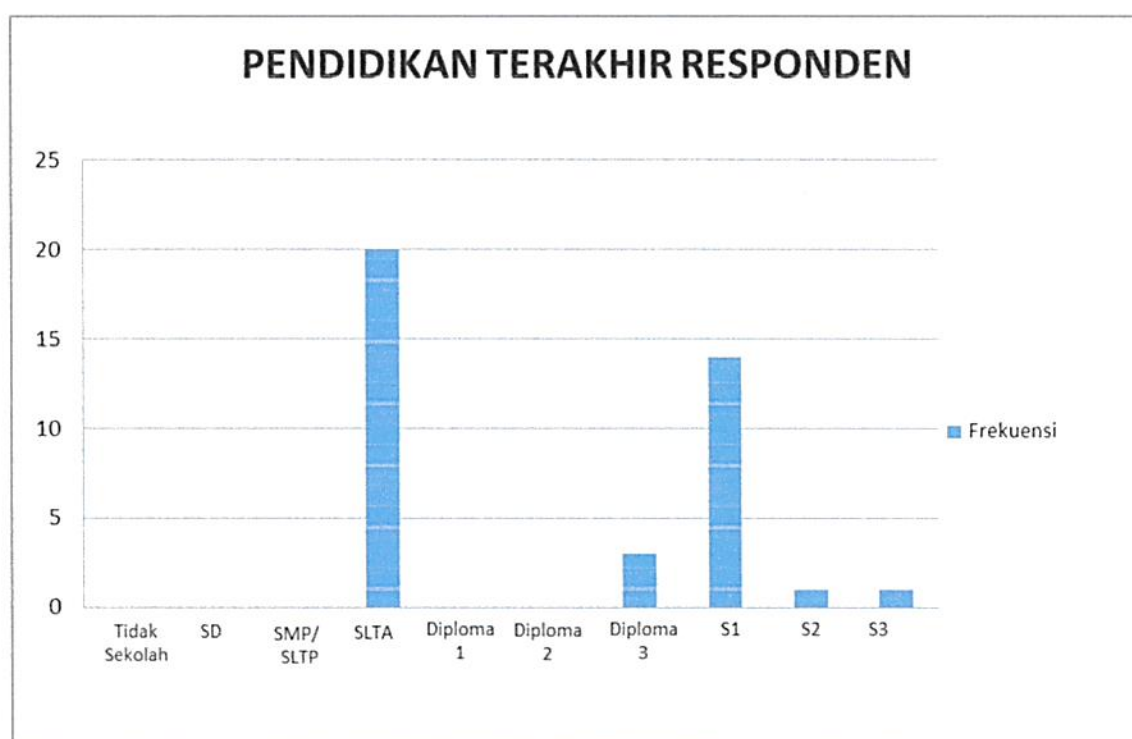
#### 3.1. Profil responden

##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar SMA sebanyak 20 (51,28%) responden.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	20	51,28
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	3	7,70
8	S1	14	35,90
9	S2	1	2,56
10	S3	1	2,56
<b>JUMLAH</b>		39	100

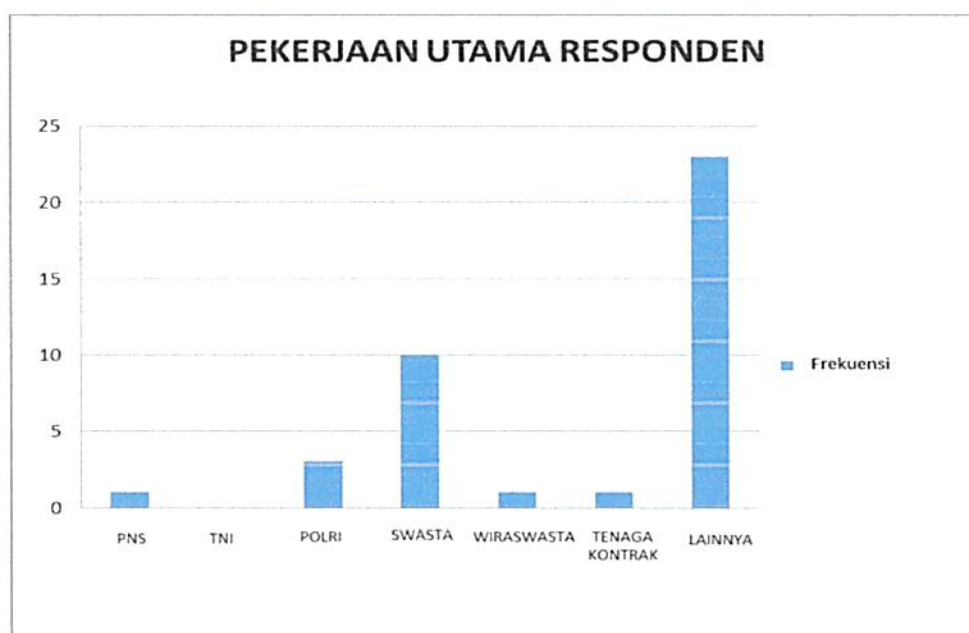


### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 23 (58,97%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki pekerjaan Lainnya.

**Tabel 5.**  
**JENIS PEKERJAAN RESPONDEN**

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	1	2,56
2	TNI	0	0
3	POLRI	3	7,70
4	SWASTA	10	25,64
5	WIRSAUSAHA	1	2,56
6	TENAGA KONTRAK	1	2,56
7	LAINNYA	23	58,98
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>100</b>

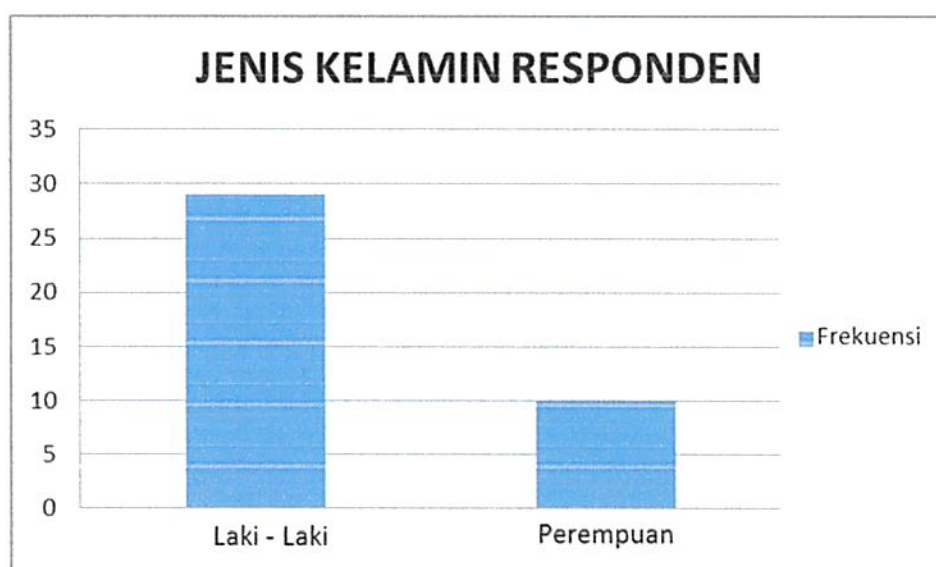


### 3.1.3. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 29 (74,35%) responden.

**Tabel 6**  
**Jenis Kelamin Responden**

NO	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	29	74,35
2	Perempuan	10	25,65
<b>JUMLAH</b>		39	100

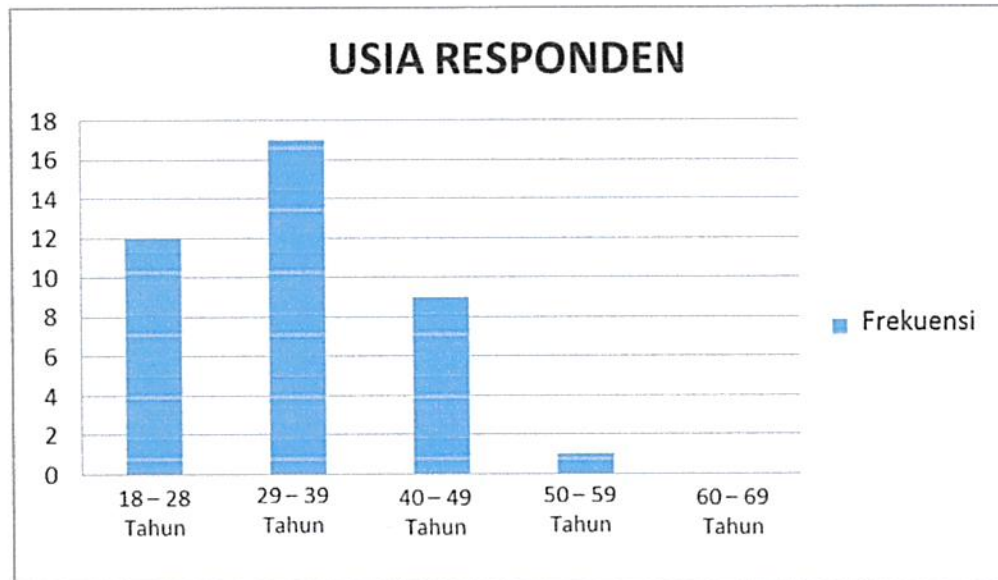


#### 3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan jumlah 17 (43,59%) responden.

**Tabel 7.**  
**USIA RESPONDEN**

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	18 – 28 Tahun	12	30,77
2.	29 – 39 Tahun	17	43,59
3.	40 – 49 Tahun	9	23,08
4.	50 – 59 Tahun	1	2,56
5.	60 – 69 Tahun	0	0
<b>Jumlah</b>		39	100



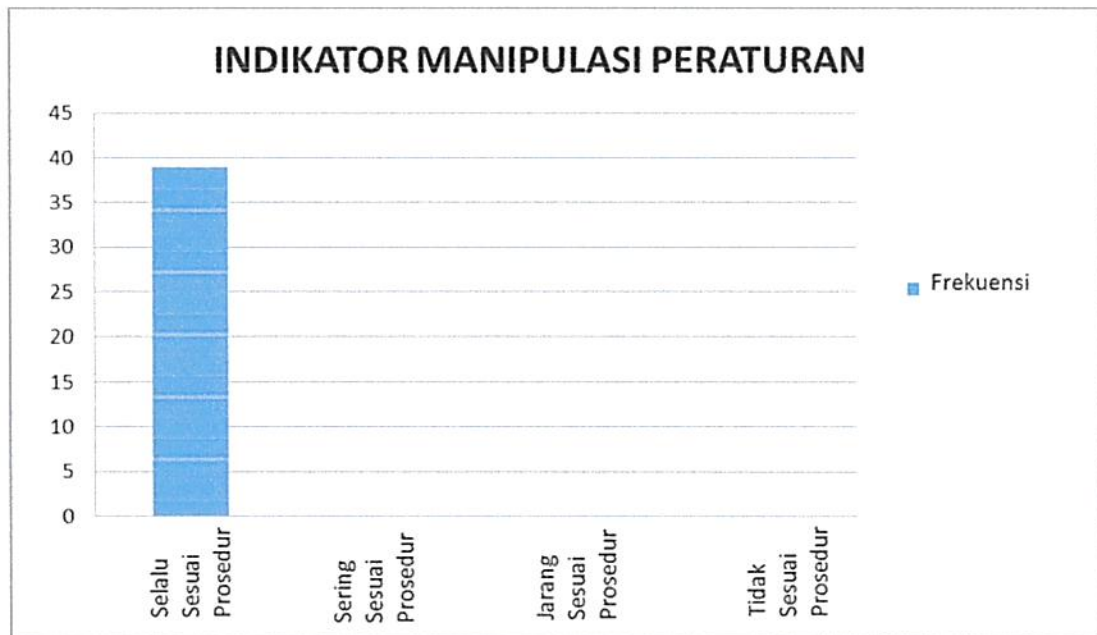
### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “156 (100%)” dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu Sesuai Prosedur (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “4,00” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “**Sangat Baik**”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Sangat Baik**”.

Tabel 8.  
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	39	100
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	0	0
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100

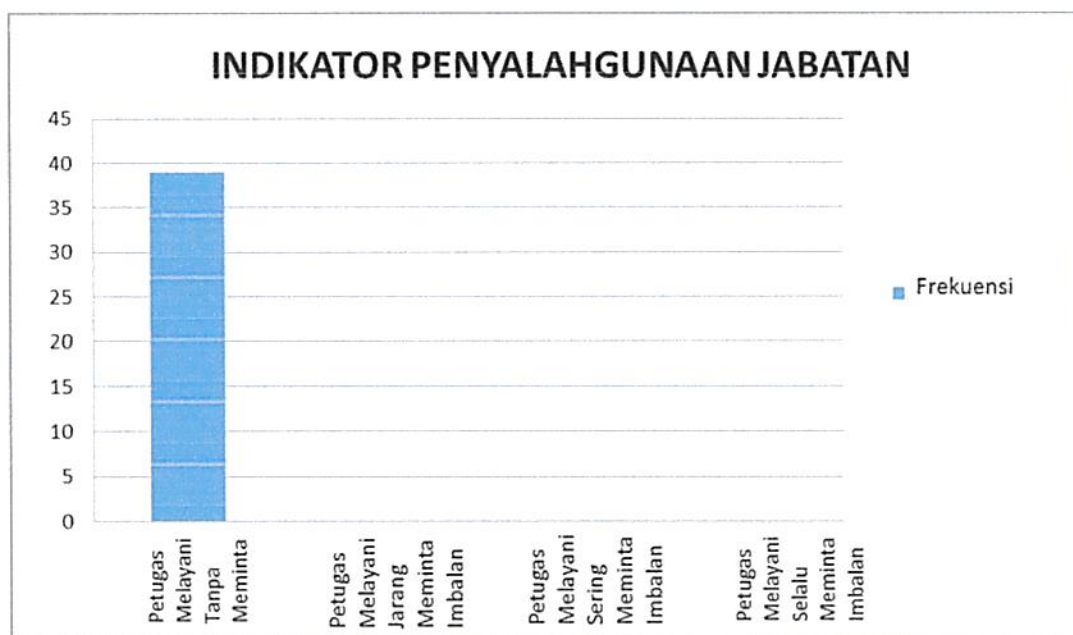


### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “156 (100%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)” pada index rata – rata skor sebesar “4.00” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 9.  
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	39	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“153 (98,07%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,923”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	37	94,88
2	Jarang	B	3	1	2,56
3	Sering	C	2	1	2,56
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



#### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

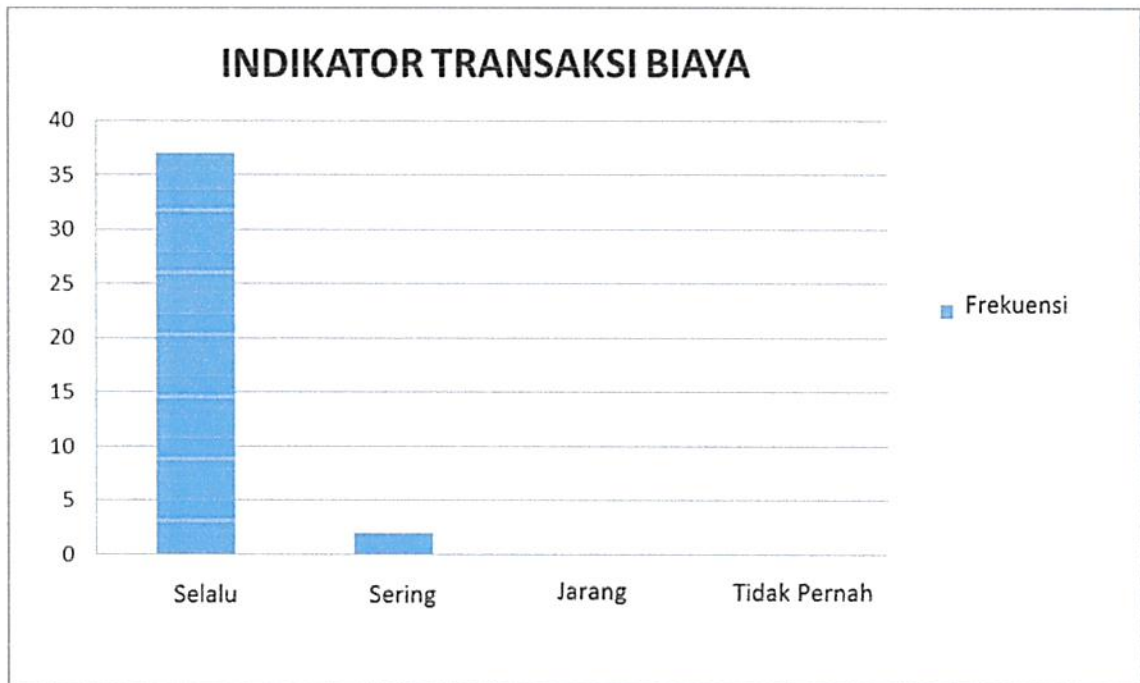
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “154 (98,71%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,949” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	37	94,88
2	Sering	B	3	2	5,12
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100





#### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “154 (98,71%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,949” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	37	94,88
2	Sering	B	3	2	5,12
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100

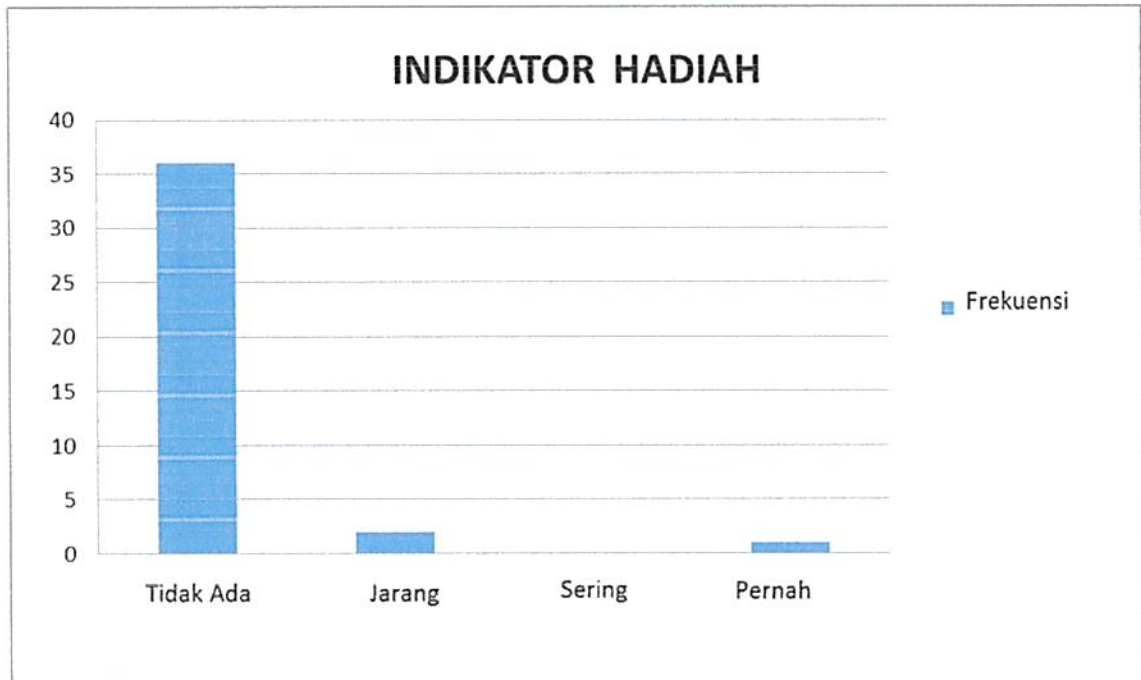


### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan “150 (96,15%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Ada (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,846” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 13.  
Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	36	92,30
2	Jarang	B	3	2	5,12
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	1	2,58
JUMLAH				39	100



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “153 (98,07%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,923” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	36	92,30
2	Sering	B	3	3	7,70
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



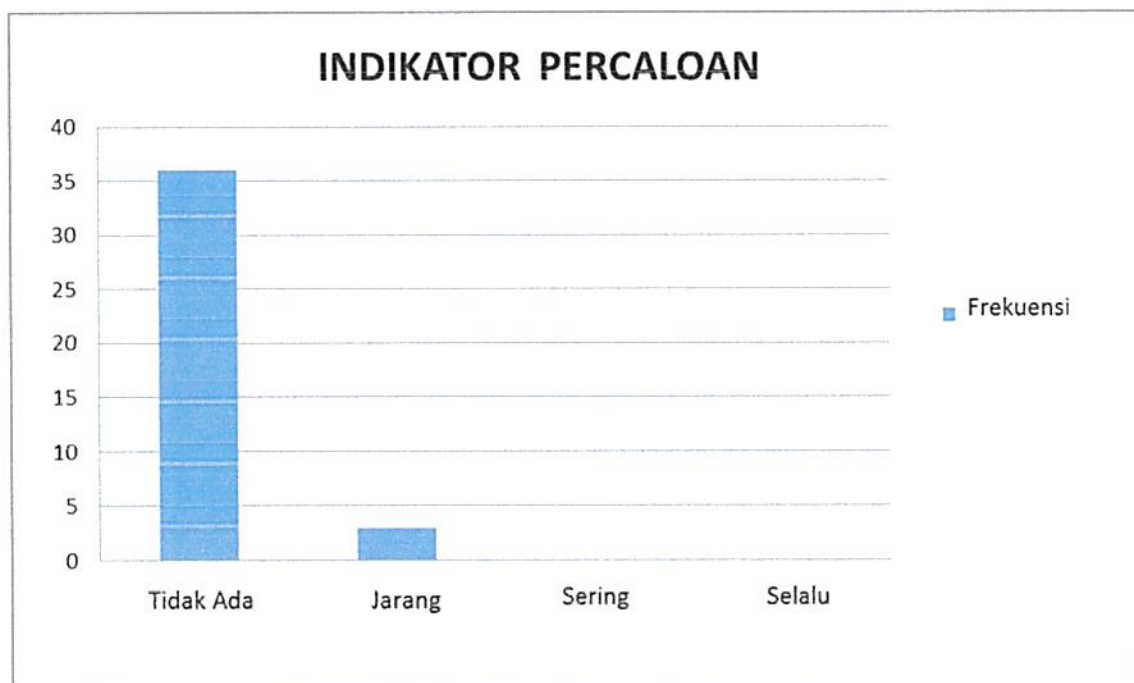
### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan **“153 (98,07%)”** dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada index rata – rata skor sebesar **“3,923”** dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00** dengan kategori **“Sangat Baik”**, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II **“Sangat Baik”**.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	36	92,30
2	Jarang	B	3	3	7,70
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



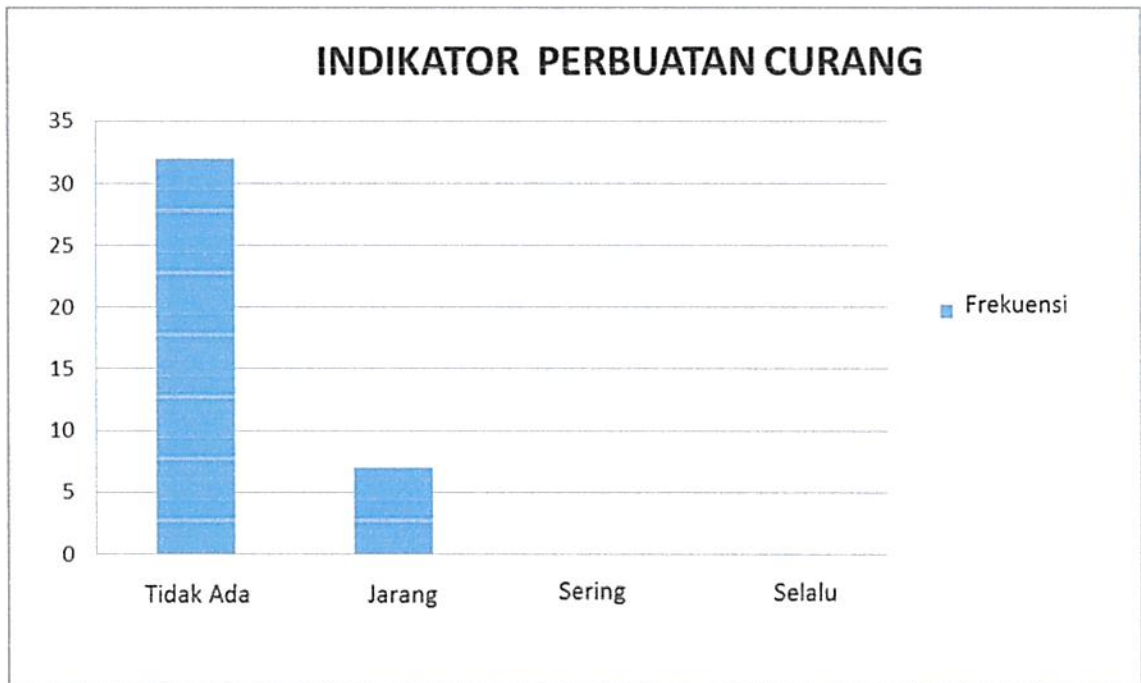
### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan “**149 (95,51%)**” dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada index rata – rata skor sebesar “**3,821**” dimana berada pada interval skor **3,26 – 4,00** dengan kategori “**Sangat Baik**”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “**Sangat Baik**”.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	32	82,05
2	Jarang	B	3	7	17,95
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



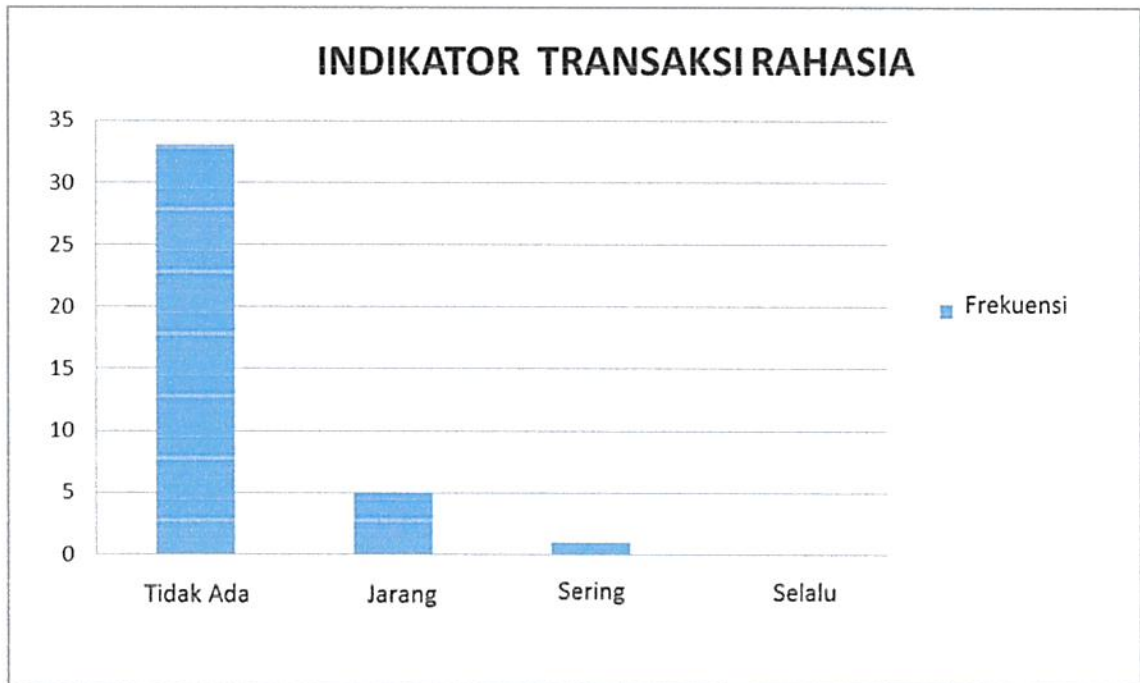
### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan “149 (95,51%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Ada (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,821” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Sangat Baik”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II “Sangat Baik”.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	A	4	33	84,61
2	Jarang	B	3	5	12,83
3	Sering	C	2	1	2,56
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				39	100



### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar “97,88”.

Tabel 18.

#### Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA - RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	4,00	0,4	Sangat Baik
2	Penyalahgunaan	4,00	0,4	Sangat Baik
3	Menjual Pengaruh	3,923	0,392	Sangat Baik
4	Transaksi Biaya	3,949	0,395	Sangat Baik
5	Biaya Tambahan	3,949	0,395	Sangat Baik
6	Hadiah	3,846	0,385	Sangat Baik
7	Transparansi Biaya	3,923	0,392	Sangat Baik
8	Percaloan	3,923	0,392	Sangat Baik
9	Perbuatan Curang	3,821	0,382	Sangat Baik
10	Transaksi Rahasia	3,821	0,382	Sangat Baik
<b>Jumlah Skor Rata – Rata Tertimbang</b>			<b>3.92</b>	
<b>IPK</b>			<b>97.88</b>	

Indeks “97.88” tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “**SANGAT BAIK**”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka “**81.26 – 100.00**”

**Tabel 19.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

**3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan**  
**Kerja pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	-



## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi “97,88” atau “3,92” dan masuk pada kategori “Sangat Baik”

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,923 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,949 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,949 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,846 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,923 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,923 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,821 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,821 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

### 4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode Triwulan I Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun

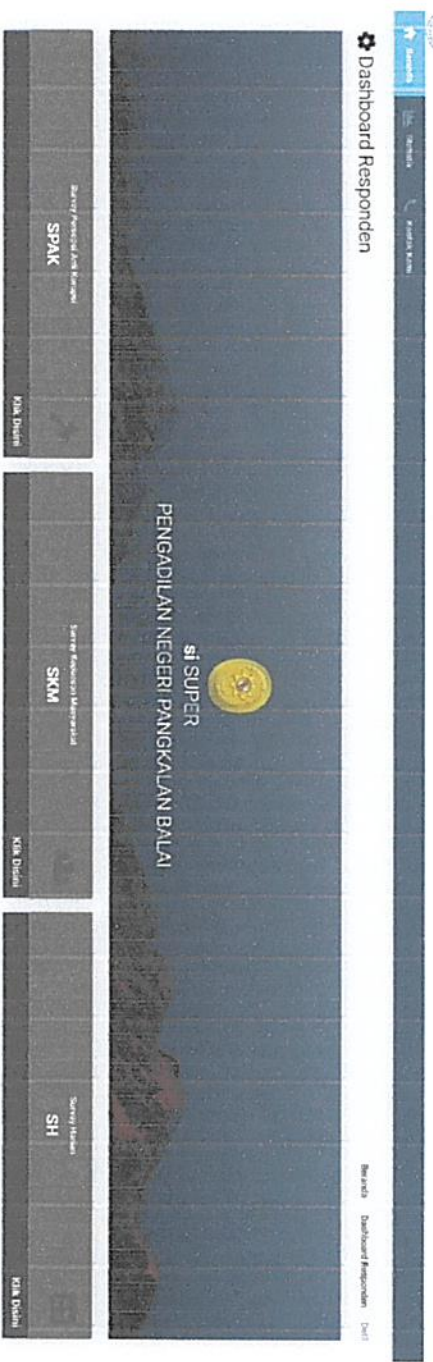
dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Perbuatan Curang, Transaksi Rahasia dan Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

# LAMPIRAN

# TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK



## FORM DATA RESPONDEN

Formulir Pengisian Data Responden

Formulir ini digunakan untuk mengisi data responden yang akan digunakan dalam proses pengolahan data.

**Data Responden SIAK**

<input type="radio"/> Layanan	<input type="radio"/> Form Kelembagaan	<input type="radio"/> Kelembagaan & Struktur
<input type="radio"/> Nama Responden	<input type="radio"/> Nama Responden	<input type="radio"/> Nama Responden
<input type="radio"/> Nomor HP	<input type="radio"/> Nomor HP	<input type="radio"/> Nomor HP
<input type="radio"/> Demografi	<input type="radio"/> Demografi	<input type="radio"/> Demografi
<input type="radio"/> Pendidikan	<input type="radio"/> Pendidikan	<input type="radio"/> Pendidikan
<input type="radio"/> Pekerjaan	<input type="radio"/> Pekerjaan	<input type="radio"/> Pekerjaan

## FORM KUESIONER

**Survei Persepsi Audit Kompi | SPAK**

Form kuesioner untuk survei bagi pengguna layanan / penciri keahlian yang mengacu pada zona integrasi dalam pelayanan Pengadilan.

**Data Responden**  
Nama serta tanggal lahir

**Layanan**  
Layanan

**Form Kuesioner**  
Layanan (dari halaman SPAK)

**Kesan & pesan**  
Mendapat informasi dari pesan Anda

X

1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketuntasan yang berlaku?  
Tidak Sesuai Prosedur  
Jurang Sesuai Prosedur  
Sering Sesuai Prosedur  
Selalu Sesuai Prosedur

2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada peralihan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?  
Petugas melayani selalu meminta imbalan  
Petugas melayani sering meminta imbalan  
Petugas melayani jarang meminta imbalan  
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3 Pernahkah dihubungi oleh seseorang (kurangnya Pengadilan) yang akan membantu dalam penggunaan surat / berkas perkara?  
Selalu  
Sering  
Jurang  
Tidak Ada

4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?  
Tidak Pernah  
Jurang  
Sering  
Selalu

5 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  
Tidak Pernah  
Jurang  
Sering  
Selalu

6	Apakah memberikan tanda terima kasir atau layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
7	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
8	Apakah pernah mengetahui ada praktik percobaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
9	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
10	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitia / Staf Pengadilan diluar persidangan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada

## FORM LAYANAN

Data Responden  
Nama serta detail responden

Layanan  
Layanan

Form Kuesioner  
Isian Form Kuesioner SSK

Kesan & pesan  
Mohon isi kesan dan pesan Anda

### Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan \*  
Pilih Layanan Yang Didapat

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? \*  
Pilih Layanan Yang Didapat

## FORM KESAN & PESAN

Data Responden  
Nama serta detail responden

Layanan  
Layanan

Form Kuesioner  
Isian Form Kuesioner SSK

Kesan & pesan  
Mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini.

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkajene Bala.  
Klik kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

Saya bukan robot

SIMPAN DATA  
SIMPAN DATA

## HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN I PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

### NILAI INDEKS

# 3,92 / 97,88 %

Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023

JUMLAH	39 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKILAKI : 29 ORANG PEREMPUAN : 10 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG SD : 0 ORG SMP : 0 ORG SMU : 20 ORG Diploma 1 : 0 ORG PNS : 1 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 3 ORG LAINNYA : 23 ORG
PEKERJAAN	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 3 ORG S1 : 14 ORG S2 : 1 ORG S3 : 1 ORG SWASTA : 10 ORG WIRSAUSAHA : 1 ORG TENAGA KONTRAK : 1 ORG



## DATA UMUR RESPONDEN IPAK TRIWULAN I DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisil Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor
Deskripsi	Jumlah ( Orang )				
18 - 28 Th			12		30,77
29 - 39 Th			17		43,59
40 - 49 Th			9		23,08
50 - 59 Th			1		2,56
60 - 69 Th			0		0,00
Total			39		
	% ( Persen )				

## DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN I DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisil Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	156	156	153	154	154	150	153	153	149	149	
NRR Per RL	4.000	4.000	3.923	3.949	3.949	3.846	3.923	3.923	3.821	3.821	39.154
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.392	0.395	0.395	0.385	0.392	0.392	0.382	0.382	3.915
IPAK Unit Pelayanan											3.92

## TIGA UNSUR TERENDAH

### EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah      3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	149
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	149
3	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	150

## TIGA UNSUR TERTINGGI

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	156
2	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	156
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	154